



PEMERINTAH KOTA BIMA

RENCANA KERJA TAHUN 2018

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BIMA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja SKPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk

RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2013-2018 dan mengacu pada RKPD Kota Bima Tahun 2018. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2018 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Benang merah Rencana Kerja SKPD sebagai penguatan Rencana Strategis SKPD adalah bagaimana mendorong pembangunan Kota Bima dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Adapun visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah:

“Berkembangnya Perekonomian Daerah Kota Bima Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dan Kelembagaan Usaha ”

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menetapkan 5 (lima) misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah - langkah selanjutnya sebagai berikut :

1. Mewujudkan arus perdagangan barang dan jasa yang tertib, wajar dan transparan;
2. Meningkatkan pengendalian serta kelancaran distribusi barang dan jasa, perlindungan konsumen dan kemetrolagian;
3. Pemberdayaan kelembagaan system ekonomi kerakyatan melalui deversifikasi usaha perkoperasian;
4. Mewujudkan Industri yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang koperasi, perindustrian dan, perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran & program yang telah ditetapkan rencana strategi, penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan & kebijakan anggaran. Tujuan utama dari rencana kerja adalah untuk :

- a. Menghubungkan rencana strategis, action plan & perencanaan operasional terperinci;
- b. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Memudahkan proses pengukuran kinerja;
- d. Membantu monitoring & evaluasi kinerja;
- e. Membantu menetapkan tujuan kinerja pada periode yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, STRATEGI DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2016 mengelola anggaran sebesar Rp.1.982.439.815,69 -(pagu anggaran belanja tidak langsung), realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.964.933.614.- atau 99,12 % dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang bersumber dari dana APBD Kota Bima Tahun 2016 berjumlah sebesar Rp.11.477.641.166.-. Sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi serapan anggaran sebesar Rp.11.013.095.100.- atau 95,95%. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran belanja langsung Tahun 2015 sebesar Rp. 7.274.383.637.- maka pada Tahun 2016 terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.3.738.711.463,- atau sekitar 51,40%. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kota Bima. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2016 sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel.1
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp	Capaian %
	PENDAPATAN	40,000,000	732,500	1.83125
1	Pendapatan Asli Daerah	40,000,000	732,500	1.83125
	BELANJA	13,460,080,981.28	12,978,028,714	96.42
1	Belanja Tidak Langsung	1,982,439,815.59	1,964,933,614	99.12
	Belanja Pegawai	1,982,439,815.59	1,964,933,614	99.12
2	Belanja Langsung	11,477,641,166	11,013,095,100	95.95
	- Belanja Pegawai	2,969,084,815.69	2,864,130,307	96.47
	- Belanja Barang dan Jasa	2,058,035,850	2,016,638,793	97.99
	- Belanja Modal	6,450,520,500	6,132,326,000	95.07

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima TA. 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan rutin Dinas yang membiayai 5 program dan 18 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.,902.185.600.
2. Program dan kegiatan urusan Koperasi yang membiayai 3 program dan 8 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.491.330.000,-
3. Program dan kegiatan urusan Perindustrian yang membiayai 4 program dan 8 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.2.733.465.650,-
4. Program dan kegiatan urusan Perdagangan yang membiayai 2 program dan 6 kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.5.469.299.500,-

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program TA. 2016 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel. 2
Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp	Capaian %	Capaian Fisik %
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	711,473,000	699,205,922	98.28	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57,627,600	57,529,531	99.83	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24,940,000	24,940,000	100.00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9,000,000	8,181,000	90.90	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,145,000	99,145,000	100.00	100
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	55,291,000	55,291,000	100.00	90
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	302,410,000	264,896,803	87.60	95
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	133,629,000	128,714,500	96.32	92
9	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	122,360,500	121,611,500	99.39	90
10	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	5,346,939,000	5,020,823,282	93.90	100
11	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	143,332,500	115,601,266	80.65	90
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	350,264,000	349,387,200	99.75	95
13	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	141,448,650	123,373,332	87.22	95
14	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	2,098,420,500	2,080,401,150	99.14	92

Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2016 dan berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebesar 95,64 % dan capaian keuangan sebesar 95,34 %.

Dengan capaian kinerja dan keuangan tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kerjanya. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi program/kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada tahun 2016 ini terdapat 3 (tiga) program/kegiatan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yang tidak memenuhi target kinerja (\leq 100%) sebagaimana yang telah direncanakan yaitu : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (67,55%), Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (79,21%) dan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri (52,25%) Penyebab tidak terpenuhinya target kegiatan tersebut diatas disebabkan dana cukai tembakau (DBHCHT) untuk program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan terlambat pencairannya. Untuk Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah penyebabnya adalah kurangnya waktu pelaksanaan diklat IKM. Untuk Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan magang ke luar daerah oleh IKM.

- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Dari 10 program dan 32 kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada tahun 2016 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan (100%) hanya sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu : Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ($>$ 100%) untuk tahun 2016 tidak ada.

- d. Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya/terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atau program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kota Bima dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

TABEL.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN
RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017

Nama SKPD : Dinas Koperindag

Lembar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Keluaran Kegiatan (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Keluaran Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2017		
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
2 11 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi									
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	99.11%	99.11%	100%	299,91%	299.91
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90%	80.71%	100%	89.16%	89.16%	100%	269.87%	299.86
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	93%	95%	100%	79.39%	79.39%	100%	274.39	295.04
	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Optimalisasi kinerja administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300.00
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	99.98%	100%	100%	100%	100%	299.80%	299.80

				10	Penyediaan alat tulis kantor	Optimalisasi kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100%	99.75%	100%	100%	100%	100%	299.75%	299.75
				11	Penyediaan barang dan pengadaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang akan mendukung kelancaran operasional dinas	100%	98.46%	100%	100%	100%	100%	298.46%	298.46
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	98.56%	100%	100%	100%	100%	298.56%	298.56
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	95,20%	100%	69.31%	69.31%	100%	264.51%	254.51
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun	100%	99.69%	100%	99.95%	99.95%	100%	299.21%	299.21
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar lembaga di luar daerah	120 Perjalanan	55 Perjalanan	50 Perjalanan	57 Perjalanan	114%	50 Perjalanan	162 Perjalanan	135.00
				19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 Perjalanan	55 Perjalanan	70 Perjalanan	75 Perjalanan	107%	70 Perjalanan	200 Perjalanan	200.00
2	11	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan & pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran								
				03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung perkantoran yang mendukung kinerja aparatur	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0.00%	0 Unit	0 Unit	-
				10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor untuk menunjang dan mendukung kinerja aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala dalam 5 tahun	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	100%	100%	100
				24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas / operasiona selama 1 tahun,	5 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	15 Unit	300

				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun	7 Jenis Peralatan	7 Jenis Peralatan	7 Jenis Peralatan	7 Jenis Peralatan	100%	7 Jenis Peralatan	21 Jenis Peralatan	300
2	11	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur								
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 132 stel dalam 5 tahun	132 Stel	40 stel	31 Stel	31 Stel	100%	33 Stel	104 Stel	78.79
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 70 stel dalam 5 tahun	70 Stel	-	-	-	-	-	-	-
				06	Pengadaan pakaian olahraga	Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga sebanyak 45 stel	45 Stel	-	-	-	-	-	-	-
2	11	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengembangan kapasitas SDM PNS								
				01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pengembangan SDM aparatur	5 Orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	2 Orang	4 Orang	80
2	11	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik								
				01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	300
				02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300

				03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
				04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300
				05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD	Tersusunnya rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD sebanyak 3 Dokumen dalam 1 tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	300
				06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersusunnya LAKIP, LPJ dan LPPD sebanyak 3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	300
2	11	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)								
				06	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	Terlaksananya koordinasi dan pengembangan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-
				08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	Operasional dan pengembangan UPT PLUT	Terpenuhi dan tersedianya operasional UPT PLUT	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
2	11	01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pendapatan Perkapita								
				06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pertumbuhan wirausaha baru	300 Peserta	25 Peserta	60 Peserta	30 Peserta	50%	30 Peserta	85 Peserta	28.33
				07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi	Bertambahnya Koperasi Aktif	120 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	83%	25 Pelaku Usaha	75 Pelaku usaha	62.50

2	11	01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya jumlah UMKM																	
				05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya UMKM yang dibina dan mendapat bantuan modal dan peralatan	100%	85%	100%	100%	100%	100%	-	185%	185.00								
				07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Meningkatnya jaringan kerjasama antar lembaga	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	275%	275.00								
				08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga dan IKM	Terselenggaranya pembinaan UMKM yang mendapat bantuan modal/peralatan	1000 UMKM	120 UMKM	200 UMKM	300 UMKM	150%	-	420 UMKM										
						Bertambahnya jumlah pelaku UMKM	4755 UMKM	1409 UMKM	1459 UMKM	575 UMKM	39%	-	1984 UMKM	41.72									
				09	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya promosi produk UMKM melalui pameran.	10 Pameran	4 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	100%	2 Pameran	8 Pameran	80.00									
				11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlapornya hasil Monev UMKM penerima dana bantuan pemerintah	100%	-	-	-	0%	85%	85%	85.00									
2	11	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif																	
				04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Terlaksananya HUT Koperasi	5 Kali	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali	20.00									
				05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan koperasi	700 Koperasi	175 Koperasi	175 Koperasi	175 Koperasi	100%	-	350 Koperasi	50.00									
				10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi aktif yang mendapat pendampingan	-	-	-	-	0%	50 Koperasi	50 Koperasi	100									

2	11	01	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang ditangani								
			01	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah UTTP yang ditera ulang	245 Unit	125 unit	200 unit	200 unit	100%	220 unit	545 unit	222.45
			02	Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah penyelesaian permasalahan	100%		100%	95%	95%	100%	195%	195.00
			04	Operasional dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Tersedianya operasional UPT	-	-	-	-	-	100%	100.0%	100
			05	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan barang-barang ilegal (CHT)	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha rokok berpita cukai	500 Pelaku Usaha	95 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	75%	50 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	44.00
			06	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	Terlaksananya pengawasan terhadap peredaran cukai hasil tembakau ilegal (rokok ilegal)	100%	85%	100%	90%	90%	100%	275%	275.00
2	11	01	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan PDRB								
			03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya pembangunan pasar	10 unit	3 Unit	8 Unit	1 Unit	12,50%	1 unit	5 unit	50.00
			06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersebaranya informasi harga sembako dan barang strategis lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300.00
			08	Operasi Pasar Murah	Terlaksananya subsidi sembako	5000 Bungkus	5000 Bungkus	2500 Bungkus	2500 Bungkus	100%	2500 Bungkus	10000 Bungkus	200.00
2	11	01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)								

				06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terciptanya industri berbasis teknologi tepatguna	100 IKM	35 IKM	20 IKM	30 IKM	150%	25 IKM	90 IKM	190.00
2	11	01	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri yang ditangani								
				02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah sentra industri yang dibina	74 Sentra	148 Sentra	74 Sentra	74 Sentra	100%	100 Sentra	322 Sentra	435.14
				07	Lomba Rancang Busana	Terlaksananya kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama ikm, perbankan atau pihak lain	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	30.00
2	11	01	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)								
				01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ditangani/dibina dalam Bimtek	175 IKM	20 IKM	60 IKM	25 IKM	42%	25 IKM	70 IKM	40.00
				02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ditangani/pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300
2	11	01	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra Industri yang tertangani								
				02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya Data / informasi pelaku industri	100%	93.77%	100%	85,50%	85.50%	100%	279.27%	279.27
				04	Promosi kerajinan tangan	Terlaksananya keikutsertaan IKM dalam pameran	10 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	100%	2 Pameran	6 Pameran	60.00
				05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri	Terlaksananya pembangunan Gedung Pujasera Amahami	3 unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	2 Unit	66.67

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima antara lain meliputi :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan ini dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan Perindustrian. Kegiatan pada Bidang Koperasi lebih ditujukan untuk pembentukan Wirausaha baru sedangkan Bidang Perindustrian ditujukan untuk peningkatan keahlian dari Industri Kecil dan Menengah.
- b. Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pengawasan ini dilakukan oleh Bidang Perdagangan. Pengawasan yang dilakukan antara lain pengawasan terhadap cukai rokok ilegal, barang kadaluarsa dan minuman beralkohol.
- c. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
Sosialisasi ini dilakukan oleh Bidang Koperasi dan Bidang Perdagangan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Koperasi terutama mengenai Undang-undang perkoperasian, sedangkan Bidang Perdagangan lebih kearah barang-barang ilegal.
- d. Operasi Pasar Murah
Operasi pasar murah diadakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang sulit terjangkau diakibatkan kenaikan harga bahan pokok. Adapun bahan pokok yang disediakan adalah beras, gula dan minyak goreng.
- e. Pemberian Bantuan Peralatan
Bantuan peralatan ini ditujukan untuk Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk menciptakan wirausaha baru yang didahului dengan pemberian pelatihan, meningkatkan hasil dan kapasitas produksi.
- f. Pembinaan Koperasi dan Industri Kecil Menengah
Pembinaan Koperasi ini dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan Koperasi menuju Koperasi yang sehat dan berkualitas. Pembinaan Industri Kecil Menengah ditujukan untuk membenahi manajemen, keuangan, produksi dan pemasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Perindustria dan Perdagangan Kota Bima dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag
Kota Bima

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terlaksananya Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah	-	-	1	0	0	0		1	0	0	0	0	
								0						
2	Terbetuknya wirausaha yang handal	-	-	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	150 UMKM	165 UMKM	175 UMKM	185 UMKM	200 UMKM	225UMKM	
3	Terbentuknya pengurus dan pengelola koperasi/KUD yang handal	-	-	74 Koperasi	81 Koperasi	86 Koperasi	96 Koperasi	101 Koperasi	74 Koperasi	81 Koperasi	86 Koperasi	101 Koperasi	101 Koperasi	
4	Terselenggaranya pembinaan bagi IKM dengan memberikan bantuan peralatan	-	-	680 UMKM	689 UMKM	709 UMKM	729 UMKM	754 UMKM	680 UMKM	689 UMKM	709 UMKM	754 UMKM	754 UMKM	
5	Bertambahnya Jumlah Pelaku UMKM	-	-	1209 UMKM	1409 UMKM	1459 UMKM	1559 UMKM	1609 UKM	1209 UMKM	1409 UMKM	1459 UMKM	1609 UKM	1609 UKM	
6	Terbinanya dan terawasinya koperasi	-	-	74 Koperasi	81 Koperasi	86 Koperasi	96 Koperasi	101 Koperasi	74 Koperasi	81 Koperasi	86 Koperasi	101 Koperasi	101 Koperasi	
7	Terciptanya industri yang berbasis teknologi	-	-	129 IKM	142 IKM	149 IKM	157 IKM	164 IKM	129 IKM	142 IKM	149 IKM	164 IKM	164 IKM	
8	Terlaksananya pembinaan IKM	-	-	73 Sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	73 Sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	

9	Terciptanya pemahaman IKM dalam penggunaan teknologi pada proses produksi	-	-	129 IKM	149 IKM	149 IKM	157 IKM	164 IKM	129 IKM	149 IKM	155 IKM	164 IKM	164 IKM	
10	Terciptanya basis data seluruh pelaku industri	-	-	73 sentra Industri	74 sentra Industri	74 sentra Industri	74 sentra Industri	74 Sentra Industri	73 sentra Industri	74 sentra Industri	74 sentra Industri	74 Sentra Industri	74 Sentra Industri	
11	Terlaksananya pengawasan yang baik terhadap peredaran barang dan jasa	-	-	246 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	440 Pelaku Usaha	485 Pelaku Usaha	246 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	485 Pelaku Usaha	485 Pelaku Usaha	
12	Tersedianya peralatan dan SDM Kemetrolgian	-	-	163 Unit	200 Unit	200 Unit	220 Unit	220 unit	163 Unit	200 Unit	200 Unit	220 unit	220 unit	
13	Terlaksananya pengembangan pasar dan lancarnya distribusi barang/produk	-	-	6 Unit	8 Unit	8 Unit	9 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju Kota Bima "Water Front City".

Potensi sumber daya alam di Kota Bima (cadangan pertanian, hutan, kelautan dan perikanan, batu marmer dll) sangat potensial untuk menumbuh kembangkan koperasi, industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam perkembangan koperasi, industri dan perdagangan, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.3.1. Kondisi Saat Ini

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, industrialisasi perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Tugas fungsional yang ada baik dibidang koperasi, industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
3. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
4. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
5. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2.3.2. Kondisi Yang Diharapkan

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan Koperasi, industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang),
3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh kopreasi dan industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,

5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor koperasi, industri dan perdagangan.

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju Kota Bima "Water Front City".

2.3.3. Kondisi Eksternal

- a. Tumbuhnya wirausaha baru belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan, maupun jaringan dan informasi pemasaran.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan industri rumah tangga dan industri kecil menengah.
- c. Pengembangan industri olahan berbasis pertanian dan perikanan masih kurang diperhatikan baik perencanaan maupun pendanaannya.
- d. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dikelola dan ditata secara optimal.
- e. Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi NTB.
- f. Sifat pasif dari pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan hanya menunggu dari bantuan pemerintah.
- g. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha.

2.3.3. Kondisi Internal

- a. Belum adanya pegawai yang memiliki keahlian yang spesifik dalam pembinaan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Sarana dan prasarana kantor yang masih terbatas.
- c. Sarana dan prasarana untuk pembinaan masing-masing bidang belum tersedia.
- d. Database bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan belum tersusun secara baik.
- e. Pola pembinaan yang tidak berkelanjutan tiap tahunnya dikarenakan belum adanya standar penilaian terhadap pembinaan saat ini. Adapun pola pembinaan yang dilakukan saat ini :
 1. Pembinaan sumber daya manusia
 2. Pembinaan pemanfaatan sumber daya alam lokal
 3. Pembinaan dan pemanfaatan teknologi
 4. Pembinaan/pengembangan dan peningkatan kreativitas dan inovasi
 5. Penyediaan sumber pembiayaan

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yan terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional :

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perluasan Pasar Domestik
3. Perbaikan Infrastruktur
4. Peningkatan kemampuan Teknologi
5. Pemerataan Kemampuan Industri
6. Pemastian industri berwawasan lingkungan
7. Penciptaan Lapangan Kerja
8. Peningkatan Modal Koperasi

Isu Global :

1. Perluasan Pasar Modern
2. Diversifikasi Produk Ekspor²⁸
3. Perubahan Iklim

Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel 5 sebagai berikut :

TABEL.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
DINAS KOPERINDAG KOTA BIMA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	RENJA TAHUN 2018				Catatan Penting	RENJA TAHUN 2019		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	2	11	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Eksistensi Dinas terhadap Penyediaan jasa dan rapat koordinasi dan konsultasi	Kota Bima	100 %	1,223,668,600	APBD		100 %	1,346,035,460	APBD
					01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat dan menyurat	Kota Bima	100 %	354,910,000	APBD		100 %	390,401,000	APBD
					02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	100 %	133,880,000	APBD		100 %	147,268,000	APBD
					06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	100 %	2,185,000	APBD		100 %	2,403,500	APBD
					07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Bima	100 %	97,400,000	APBD		100 %	107,140,000	APBD
					08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Bima	100 %	36,084,000	APBD		100 %	39,692,400	APBD

						10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Bima	100 %	43,223,400	APBD		100 %	47,545,740	APBD
						11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Bima	100 %	168,100,000	APBD		100 %	184,910,000	APBD
						13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Kota Bima	90 %	55,890,000	APBD		90 %	61,479,000	APBD
						15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kota Bima	5 Media Bacaan	8,400,000	APBD		5 Media Bacaan	9,240,000	APBD
						17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk menunjang kegiatan pegawai	Kota Bima	100 %	38,096,200	APBD		100 %	41,905,820	APBD
						18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar lembaga/instansi di luar daerah	Luar Daerah	55 Perjalanan	255,000,000	APBD		55 Perjalanan	280,500,000	APBD
						19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar instansi dalam daerah	Kota Bima	35 Perjalanan	30,500,000	APBD		35 Perjalanan	33,550,000	APBD
2	11	2	11	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan & pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Kota Bima	90 %	125,381,000	APBD		90 %	137,919,100	APBD
						22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Bima	90 %	35,000,000	APBD		90 %	38,500,000	APBD
						24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Bima	95 %	39,950,000	APBD		95 %	43,945,000	APBD
						26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	90 %	39,000,000	APBD		90 %	42,900,000	APBD
						28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kota Bima	90 %	11,431,000	APBD		90 %	12,574,100	APBD

2	11	2	11	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengembangan kapasitas SDM PNS	Luar Daerah	100 %	10,000,000	APBD		100 %	11,000,000	APBD
							Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pengembangan aparatur SDM	Luar Daerah	3 Orang	10,000,000	APBD		3 Orang	11,000,000	APBD
2	11	2	11	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	Kota Bima	100 %	193,250,000	APBD		100 %	212,575,000	APBD
						02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen	Kota Bima	2 Laporan	13,200,000	APBD		2 Laporan	14,520,000	APBD
						03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen	Kota Bima	2 Laporan	14,800,000	APBD		2 Laporan	16,280,000	APBD
						04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen	Kota Bima	4 Laporan	21,850,000	APBD		4 Laporan	24,035,000	APBD
						05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD	Tersusunnya rencana kerja tahunan/RKA/DPPA SKPD sebanyak 3 Dokumen dalam 1 tahun	Kota Bima	4 Dokumen	90,950,000	APBD		4 Dokumen	100,045,000	APBD
						06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersusunnya LAKIP dan LPPD sebanyak 2 dokumen	Kota Bima	2 Dokumen	52,450,000	APBD		2 Dokumen	57,695,000	APBD
2	11	2	11	01	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya pelayanan dan operasional UPT PLUT	Kota Bima	100 %	109,079,600	APBD		100 %	119,987,560	APBD
						12	Operasional dan pengembangan UPT PLUT	Meningkatnya pelayanan dan operasional UPT PLUT	Kota Bima	100 %	109,079,600	APBD		100 %	119,987,560	APBD
2	11	2	11	01	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	Kota Bima	150 WUB	155,667,800	APBD		150 WUB	171,234,580	APBD

						06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	Kota Bima	150 WUB	96,519,800	APBD		150 WUB	106,171,780	APBD
						07	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi	Meningkatnya management pengelolaan Koperasi	Kota Bima	85 %	59,148,000	APBD		85 %	65,062,800	APBD
2	11	2	11	01	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Kota Bima	25 %	239,670,700	APBD		25 %	263,637,770	APBD
						07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Meningkatnya pemasaran produk UMKM	Kota Bima	150 UMKM	62,278,200	APBD		150 UMKM	68,506,020	APBD
						09	Penyelenggaraan promosi produk UMKM	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk UMKM	Luar Daerah	10 UMKM	152,698,000	APBD		10 UMKM	167,967,800	APBD
						11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya pelayanan dan operasional UPT PLUT	Kota Bima	85 %	24,694,500	APBD		85 %	27,163,950	APBD
2	11	2	11	01	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi aktif	Kota Bima	110 Koperasi	294,046,800	APBD		110 Koperasi	323,451,480	APBD
						04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Meningkatnya pengetahuan perkoperasi	Kota Bima	85 %	149,478,300	APBD		85 %	164,426,130	APBD
						05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Meningkatnya Koperasi aktif	Kota Bima	110 Koperasi	101,273,500	APBD		110 Koperasi	111,400,850	APBD
						10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	Meningkatnya pengetahuan dan management pengelolaan Koperasi	Kota Bima	85 %	43,295,000	APBD		85 %	47,624,500	APBD
3	06	2	11	01	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Kota Bima	85 %	446,660,500	APBD		85 %	491,326,550	APBD
						02	Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan	Terfasilitasinya permasalahan atas pengaduan konsumen	Kota Bima	100 %	31,517,000	APBD		100 %	34,668,700	APBD

							konsumen											
						04	Operasional dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Jumlah UTTP yang di Terra	Kota Bima	240 UTTP	85,541,000	APBD		240 UTTP	94,095,100	APBD		
						05	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan barang-barang ilegal (CHT)	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha rokok berpita cukai	Kota Bima	150 Pelaku Usaha	229,545,000	APBD		150 Pelaku Usaha	252,499,500	APBD		
						06	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran cukai hasil tembakau ilegal (rokok ilegal)	Kota Bima	150 Pelaku Usaha	100,057,500	APBD		150 Pelaku Usaha	110,063,250	APBD		
3	06	2	11	01	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pertumbuhan PDRB	Kota Bima	6.5 %	3,152,044,000	APBD		6.5 %	3,467,248,400	APBD		
						03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Terlaksananya revitalisasi/pembangunan pasar sarae dan paruga	Kota Bima	2 Pasar	2,765,060,000	APBD		2 Pasar	3,041,566,000	APBD		
						06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tersebaranya informasi harga sembako dan barang strategis lainnya	Kota Bima	12 Bulan	183,459,000	APBD		12 Bulan	201,804,900	APBD		
						08	Operasi Pasar Murah	Terlaksananya subsidi sembako untuk masyarakat	Kota Bima	2500 Paket	203,525,000	APBD		2500 Paket	223,877,500	APBD		
3	07	2	11	01	15		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku industri kecil menengah (IKM)	Kota Bima	40 IKM	165,647,500	APBD		40 IKM	182,212,250	APBD		
						06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Terlaksananya diklat maupun magang bagi ikm	Kota Bima	40 IKM	165,647,500	APBD		40 IKM	182,212,250	APBD		
3	07	2	11	01	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama ikm, perbankan atau pihak lain	Kota Bima	85 %	132,636,000	APBD		85 %	145,899,600	APBD		

						07	Lomba Rancang Busana	Meningkatnya kemitraan yang saling menguntungkan dengan sesama ikm, perbankan atau pihak lain	Kota Bima	85 %	132,636,000	APBD		85 %	145,899,600	APBD
3	07	2	11	01	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya kapasitas produksi dan mutu produk	Kota Bima	164 IKM	137,529,400	APBD		164 IKM	151,282,340	APBD
						01	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Meningkatnya mutu produk dan SDM pelaku IKM	Kota Bima	100 %	84,064,200	APBD		100 %	92,470,620	APBD
						02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Meningkatnya kapasitas produksi dan mutu produk	Kota Bima	5 IKM	53,465,200	APBD		5 IKM	58,811,720	APBD
3	07	2	11	01	19		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya Sentra Industri di daerah	Kota Bima	74 Sentra	2,114,718,100	APBD		74 Sentra	2,326,189,910	APBD
						02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Tersedianya informasi produk IKM	Kota Bima	100 %	33,140,100	APBD		100 %	36,454,110	APBD
						04	Promosi kerajinan tangan	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk ikm	Luar Daerah	10 IKM	68,030,000	APBD		10 IKM	74,833,000	APBD
						05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri	Meningkatnya Sentra Industri di daerah	Kota Bima	74 Sentra	2,013,548,000	DAK		74 Sentra	2,214,902,800	DAK
JUMLAH											8,500,000,000			9,350,000,000		

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2013-2018 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Bima dan identifikasi program serta kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah berikut pendanaan indikatif.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2013-2018. RENJA Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor koperasi, industri dan perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

URUSAN KOPERASI

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan

monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri.

Urusan Perindustrian adalah Sebagai Berikut :

1. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
2. Pengembangan IKM
3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

URUSAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pemantapan struktur ekonomi daerah.

Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

Kebijaksanaan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) di Kota Bima pada tahun 2018 diarahkan pada :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan kepada pelaku usaha
3. Meningkatkan bantuan modal kerja
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk
5. Meningkatkan legalitas / ijin usaha
6. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)
7. Meningkatkan bantuan peralatan usaha
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
9. Meningkatkan produktifitas, efisiensi daya saing usaha Perindustrian dan Perdagangan
10. Meningkatkan pendapatan dan pengusaha perajin

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) merupakan sektor yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima terus meningkatkan peranannya dalam mengembangkan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag).

Dalam tahun 2018 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) telah menetapkan sasaran yang ingin di capai sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
2. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pelaku usaha
3. Meningkatnya bantuan modal kerja
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk
5. Meningkatnya legalitas / ijin usaha
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7. Meningkatnya bantuan peralatan usaha

8. Meningkatnya sarana dan prasarana usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
9. Meningkatnya produktifitas, efisiensi dan daya saing usaha Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag)
10. Meningkatnya pendapatan pengusaha dan pedagang

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Koperindag Kota Bima untuk Tahun 2018 terdapat 7 program utama dan 8 program pendukung. Dimana program utama dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
6. Program Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial
7. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Kegiatan adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Untuk mencapai tujuan / sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka dijabarkan kebijakan dan program sebagai pedoman / pegangan bagi para pelaksana kegiatan sebagai berikut

Sementara yang menjadi kelompok sasaran dari indikator kinerja SKPD adalah masyarakat kota Bima dan internal SKPD sendiri agar dapat menghasilkan optimalisasi pelayanan fungsi SKPD bagi pembangunan kota Bima dalam mencapai visi & misinya.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2018 yang terdiri atas 15 Program dan terurai melalui 50 kegiatan, maka dana indikatif yang dibutuhkan adalah sejumlah Rp 12.582.002.800. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima (APBD II)

BAB IV

PENUTUP

Dalam mewujudkan VISI Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima yakni ***“Berkembangnya Perekonomian Daerah Kota Bima Yang Berorientasi Pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Kelembagaan Usaha ”*** maka kematangan rencana strategis 2013 – 2018 yang tertuang dalam rencana kerja tahunan adalah pedoman kerja untuk tahun 2018.

Sehingga langkah menuju VISI Kota Bima ***“Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Perdagangan dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera”***

dapat diwujudkan melalui partisipasi Dinas berdasarkan tupoksinya.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat dipedomani, ditindaklanjuti dan diwujudkan bersama .

Raba-Bima, 18 April 2017

Plt. Kepala Dinas Koperindag Kota Bima,

Nurjanah, S.Sos
NIP. 19631016 198703 2 009

